



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



Nomor : 800/112/BKPSDMD/2019  
Tanggal : 30/01/2019

No. Koreksi : 768

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Tentang : Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dari Lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementrian Perhubungan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019

PETUGAS

Mulyani

PENERIMA

Norma

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MAIN 30/01/1915:46



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 800/112/BKPSDMD/2019**

**TENTANG**

**KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DARI LULUSAN SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi persyaratan pengangkatan lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu adanya penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2018;
  2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 706

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	✓
SKPD PEMRAKARSA	✓

tanggal 26 November 2018 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dari Lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan di Lingkungan Kota Palu Tahun Anggaran 2018;

3. Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kota Palu tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat Nomor: HK.201/ II/ STTD-2017, Nomor: II/ PKS/PEMKOT PALU-Sekolah Tinggi Transportasi Darat;
4. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V62-4/93 tanggal 8 Mei 2018;
5. Surat Kementerian Perhubungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Nomor : SM.001/9/16/STTD-2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal Penyampaian Nama Taruna Pola Pembibitan Daerah Tahun Lulus 2018;
6. Surat Wali Kota Palu Nomor: 871/ 2087/ BKPSDMD/2018 tanggal 12 September 2018;

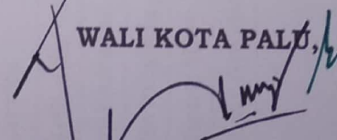
MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

KESATU : Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 30 Januari 2019

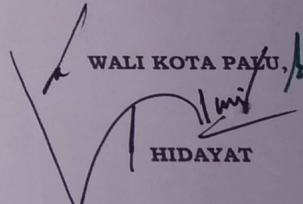
**WALI KOTA PALU,**  
  
**HIDAYAT**

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

21a

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
 NOMOR 800/112/BKPSDMD/2019  
 TENTANG  
 KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI LULUSAN  
 SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT  
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN  
 ANGGARAN 2019

NO	NAMA	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1		2	3	4	5
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>				<b>7</b>	
1	Andi Fitri Utari Lukman	Analisis Teknik Survei Pemaduan Moda Transportasi Darat	D.IV Transportasi Darat	1	Dinas Perhubungan
2	Kartika	Analisis Teknik Survei Pemaduan Moda Transportasi Darat	D.IV Transportasi Darat	1	Dinas Perhubungan
3	Meilynda Veronica	Pengawas dan Pembina Angkutan	D.IV Transportasi Darat	1	Dinas Perhubungan
4	Muhammad Fandar Indra Perkasa	Pengelola Sarana Angkutan	D.III Perkeretaapian	1	Dinas Perhubungan
5	Novin Silvia Agustin	Pengelola Sarana Angkutan	D.III Perkeretaapian	1	Dinas Perhubungan
6	Wisnu Hary Prasetya	Pengelola Sarana Angkutan	D.III Perkeretaapian	1	Dinas Perhubungan
7	Anjar Apridita Mahda	Pengelola Pengawasan LLAJ	D.III LLAJ	1	Dinas Perhubungan

  
 WALI KOTA PALU,  
 HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	